



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sambutan Pengarahan Gubernur DIY Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan III Tahun 2015

Yogyakarta, Kamis 29 Oktober 2015

1. Yth. Wakil Gubernur DIY;
2. Yth. Pimpinan dan Ketua Komisi DPRD DIY;
3. Yth. Bupati/Walikota se DIY;
4. Yth. Komisioner Komisi Informasi Nasional dan Komisioner KIP, beserta seluruh jajarannya;
5. Yth. Para Tenaga Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
6. Yth. Para Kepala SKPD dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah DIY; dan
7. Hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segenap limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa bertemu pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan III Tahun 2015, sekaligus bersilaturahmi bersama segenap jajaran Komisioner Komisi Informasi Nasional dan Komisi Informasi Provinsi, dalam suasana yang sehat dan sentaosa.

Hadirin Sekalian yang Saya hormati,

Pertemuan yang saat ini secara rutin kita selenggarakan ini sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi menuju *good and clean governance*, melalui kebijakan yang transparan, efektif, inovatif, dan akuntabel.

Mencermati paparan yang disampaikan Kepala Bappeda mengenai progress pengendalian pembangunan daerah pada triwulan III, menunjukkan adanya peningkatan performa kinerja pemerintahan dibandingkan periode sebelumnya. Saya memberikan apresiasi atas optimalisasi kinerja fisik dan keuangan pada sebagian besar SKPD dalam mengupayakan gerak roda pembangunan daerah untuk melintasi tantangan dan persoalan yang kian dinamis.

Hal yang sama juga ditunjukkan pada kinerja yang dialokasikan dari APBN dengan menunjukkan performa yang tidak jauh berbeda, terutama capaian kinerjanya yang diharapkan tetap optimal hingga akhir tahun anggaran.

Tentunya, kinerja yang baik dan terukur tidak sekedar diteropong berdasarkan serapan fisik maupun keuangan saja, melainkan bagaimana output yang dihasilkan suatu kegiatan itu mampu memberikan outcome bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih, optimalisasi kinerja serapan anggaran pemerintah, sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian nasional, yang saat ini cenderung tertekan sebagai implikasi atas lesunya perekonomian dunia. Untuk itu, program kegiatan yang berkualitas diharapkan mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Implikasi penting hasil pembangunan yang riil tersebut merupakan bentuk *anggunowentah* dari pelaksanaan *good governance* yang tangguh, efektif, dan efisien; dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain negara, swasta, dan masyarakat, sebagai *civil society*. Oleh karenanya, hal lain yang perlu Saya sampaikan adalah perlunya mengawal beberapa paket pekerjaan yang saat ini masuk dalam kategori kontrak kritis, baik yang dibiayai melalui APBD maupun APBN.

Memasuki triwulan terakhir tahun 2015 ini, Saya sebagai Gubernur, yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengingatkan pentingnya optimalisasi pelaksanaan pembangunan secara akuntabel dan mengharapkan bahwa semua paket pekerjaan bisa dilaksanakan, serta terselesaikan hingga tepat waktu, juga tepat sasaran, sehingga memiliki daya ungkit pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Upaya pengendalian pembangunan, sebagaimana telah diupayakan melalui berbagai instrument, seperti : AKIP, Laporan Kinerja, maupun Koordinasi Pengendalian Triwulanan, sebagaimana dilaksanakan pertemuan pada hari ini, bukanlah merupakan tujuan *an sich*, melainkan sebagai suatu media untuk berproses dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, janganlah berbangga diri atas sejumlah prestasi yang sudah diperoleh. Teruslah melakukan perbaikan dan senantiasa berinovasi, serta tidak perlu malu untuk menengok keberhasilan daerah lain, seperti halnya : (1) adanya daerah yang telah menerapkan sistem penilaian SKP berbasis informasi teknologi, maupun (2) upaya merintis penyusunan ASB/SHBJ berbasis *on-line* yang terkoneksi dengan sistem perencanaan; karenanya akan semakin mempermudah dalam mendesain kegiatan secara lebih berkualitas.

Saya berharap Pemerintah Daerah bisa mereplikasi sejumlah contoh keberhasilan rintisan upaya inovatif tersebut, mengingat beberapa *tools* yang menjadi komponen perbaikan itu justru semakin mempermudah dalam rangka melakukan reformasi pelayanan publik yang mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi, kemudahan pelayanan, memperpendek alur birokrasi, berorientasi pada kepuasan publik, dengan tetap berpijak pada aturan *tata-pranatan* yang sudah ditetapkan. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa yang abadi dalam sebuah kehidupan adalah “perubahan” itu sendiri.

Selain itu, mencermati hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Pemerintah Daerah masih perlu untuk melakukan perbaikan *cascading* pada sejumlah dokumen perencanaan, baik pada alur perencanaan jangka menengah hingga pada perencanaan strategis SKPD, terutama berkaitan dengan kesesuaian alur logika yang seharusnya dikerjakan oleh SKPD. Saya minta dalam waktu dekat ini, segera dapat menyelaraskannya terhadap tujuan, sasaran, hingga program-kegiatan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Salah satu implikasi pasca pencapaian akuntabilitas kinerja adalah maraknya kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melakukan studi banding tentang mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan penilaian subyektif yang dominan atas respon mereka adalah belum siapnya beberapa daerah atas keniscayaan untuk melakukan keterbukaan informasi, sebagaimana sudah diinisiasi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Mencermati aspek ini, Saya mengapresiasi upaya Pemda DIY yang sudah mengawali langkah inisiasi terhadap keterbukaan informasi kepada publik.

Adanya keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu kunci dari upaya untuk mewujudkan *good governance*, yang direpresentasikan melalui semangat transparansi. Transparansi itu memungkinkan keterlibatan publik semakin intens dalam ruang-ruang untuk berproses dalam menghasilkan kebijakan yang harus berpihak kepada publik.

Keterbukaan informasi merupakan tuntutan zaman sekaligus kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses dan layanan yang memadai, termasuk dalam proses penyusunan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mustahil didalam pengelolaannya dibarengi polemik ataupun sengketa.

Berkaitan dengan itu, Saya sangat mendukung upaya kemitraan yang *manunggal* antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Informasi Provinsi dalam rangka mengawal keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterbukaan informasi publik merupakan proses edukasi sekaligus advokasi kepada masyarakat yang harus diberdayakan agar memahamitanggungjawab terhadap proses pembangunan masa depan yang lebih bermartabat, lebih demokratis, lebih saling menghargai, dan lebih sejahtera.

Saya mengharapkan Komisi Informasi tetap berperan independen dan professional dalam menyelesaikan sengketa informasi publik secara cepat, tepat, dan mudah.

Untuk itu, Saya sepenuhnya mendukung terhadap ketugasan Komisi Informasi di DIY. Kami siap berkoordinasi dan bekerjasama agar keterbukaan informasi pada seluruh badan publik yang ada di wilayah DIY bisa dilakukan secara berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Sebagaimana tema pertemuan pada hari ini, “**Memantabkan Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Keterbukaan Sistem Informasi yang Transparan dan Akuntabel**”, pada kesempatan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran Komisioner Komisi Informasi Provinsi, yang sudah menjalani masa tugas selama satu periode, dengan baik. Apa yang telah Saudara-saudara abdikan, dapat member makna bagi perkembangan keterbukaan informasi di DIY.

Sudah cukup banyak capaian yang dihasilkan KIP di DIY selama periode ini. Namun, yang terpenting bukan hanya sekedar banyaknya penanganan atas jumlah kasus aduannya, melainkan juga tingkat kualitas aduan; menjadi parameter tingkat kesadaran masyarakat. Jumlah tanpa diimbangi kualitas, hanya menunjukkan penanganan yang mendekati atas ritme administratif statistik belaka.

Saya memiliki sejumlah harapan bagi segenap jajaran Komisioner Informasi Publik dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk menjadi Pamong yang *Pinunjul*. Untuk mengarah ke watak *Pinunjul*, setidaknya harus kembali ingat pada konsep watak sebagaimana ajaran *Astabrata*.

Dari delapan watak alam dari ajaran *Astabrata*, hanya akan Saya ringkas menjadi dua, yakni *wataking srengenge* dan *wataking samudero*, sebagai ciri dua watak yang utama.

Berwatak *srengenge* atau matahari yang menjadi sumber pencerahan, sumber kehidupan, sumber inspirasi, sehingga bisa menghidupi, *ngurupi lan nguripi tumraping liyan*. Matahari bisa menerangi sesuatu yang gelap menjadi terang, dari yang remang-remang menjadi transparan.

Adapun watak samudera itu menunjukkan luasnya ilmu pengetahuan dan mengesankan tanpa batas, bisa menerima semua perbedaan. Untuk bisa menjadi pamong yang baik itu harus bisa memberikan pengayoman kepada siapa saja. Itulah esensi pamong yang : *ngayomi* sekaligus *nguripi*, *ngayemi* sekaligus *ngurupi*.

Itulah kunci untuk menjadi *darmaning narendra kang ambeg adil paramarta, agawe sing cedhak manglung, sing adoh tumiyung*.

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGGU BUWONO X